



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

---

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke- 2 (dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 25 November 2010
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.30 WIB s.d 14.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Evaluasi sistem pelayanan transportasi nasional. 2. Evaluasi peran dan kualitas pelayanan PT Garuda Indonesia dan PT. Merpati Nusantara dalam mendukung sistem transportasi udara nasional. 3. Penjelasan permasalahan keterlambatan penerbangan yang dialami oleh maskapai Garuda Indonesia.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said
Sekretaris	: Sartomo, SS
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Wakil Dirut PT Merpati Nusantara beserta jajaran terkait.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Dirut PT. Garuda Indonesia, Wakil Dirut PT. Merpati Nusantara pada hari ini adalah evaluasi sistem pelayanan transportasi nasional, evaluasi peran dan kualitas pelayanan PT Garuda Indonesia dan PT. Merpati Nusantara dalam mendukung sistem transportasi udara nasional, serta penjelasan terhadap permasalahan keterlambatan penerbangan yang dialami oleh maskapai Garuda Indonesia.
3. Ketua mempersilakan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Direktur Utama PT Merpati Nusantara dan pejabat lainnya untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI menyatakan kekecewaan dan keperihatinan yang mendalam atas kejadian keterlambatan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendukung langkah PT. Garuda Indonesia untuk melakukan investigasi dan audit secara menyeluruh (termasuk audit sistem IT) terhadap peristiwa keterlambatan penerbangan yang terjadi sejak 18 November hingga 24 November 2010 serta meminta pihak Manajemen agar menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat luas.
2. Terkait poin 1 di atas, Komisi V DPR RI meminta Direksi PT. Garuda Indonesia untuk memberikan sanksi dan tindakan yang tegas kepada pihak-pihak yang karena keteledoran maupun kesengajaannya terbukti dari hasil investigasi menyebabkan kejadian keterlambatan tersebut.
3. Terhadap sinyalemen bahwa penyebab kejadian tersebut adalah penggantian sistem menjadi Integrated Operational Control System (IOCS) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, Komisi V DPR RI mengingatkan kembali bahwa ke depannya setiap penggantian system harus didahului dengan masa percobaan secara terbatas terlebih dahulu, *parallel run period* serta harus selalu mempunyai *backup system* sehingga tidak berdampak luas bila terjadi kegagalan sistem.
4. Komisi V DPR RI mengharapkan Kementerian Perhubungan untuk dapat meningkatkan fungsi pembinaan yang dimilikinya sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan antara lain dengan melakukan fungsi pengawasan pembangunan dan pengoperasian termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum bila diperlukan.
5. Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan mengoptimalkan maskapai penerbangan nasional untuk melayani rute penerbangan domestik untuk meningkatkan *multiplier effect* bagi bangsa dan negara.
6. Komisi V DPR RI meminta Direktur Utama PT. Merpati Nusantara untuk menjawab semua tanggapan maupun pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat pada hari ini secara tertulis selambat-lambatnya pada awal Desember 2010.
7. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk menginstruksikan agar seluruh maskapai menyediakan pos pengaduan/membuka saluran komunikasi kepada masyarakat luas di setiap bandar udara.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB.

Jakarta, 25 November 2010

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

ttd

**MOH. IKSAN TATANG**

**DIREKTUR UTAMA  
PT. GARUDA INDONESIA**

ttd

**EMIRSYAH SATAR**

**KETUA RAPAT,**

ttd

**H. MUHIDIN M. SAID**

**WAKIL DIREKTUR UTAMA  
PT. MERPATI NUSANTARA**

ttd

**ADHY GUNAWAN**



Jakarta, 22 September 2010

KETUA RAPAT,

H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

IR. MOH. IKSAN TATANG

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH

DRS. SUROYO ALIMOESO

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

DIRJEN PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

SUNARYO, SH

IR. HERRY BAKTI SINGAYUDA G, MM

IR. TUNDJUNG INDERAWAN, MSI

KEPALA BADAN LITBANG  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEPALA BADAN DIKLAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

IR. L. DENNY SIAHAAN, MS.TR

IR. DEDI DARMAWAN.





